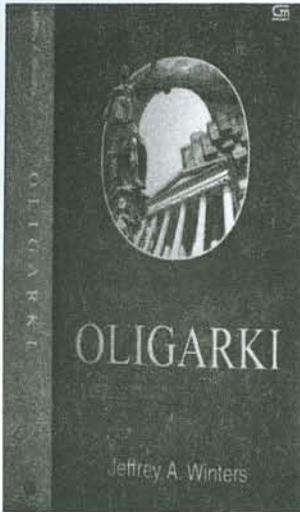


RESENSI BUKU



Judul : Oligarki

Pengarang : Jeffrey A. Winters

Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kolasi : xxvi + 426 halaman

ISBN : 978-979-22-7797-5

Buku ini dibuka dengan kerangka teoritis yang menjelaskan dasar material oligarki. Selama berabad-abad, oligarki dianggap sebagai representasi penguasaan kekayaan. Kesamaan definisi oligarki sepanjang sejarah merupakan cara mempertahankan dan memperkuat secara inheren atas kekayaan. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuatan politiknya berada di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat. Asal kata oligarki berasal dari bahasa Yunani *oligarkhia*, yang berarti pemerintahan oleh sekelompok kecil, yang terdiri atas oligoi (sedikit) dan *arkhein*, yang berarti memerintah. Hampir semua teori tentang oligarki mendefinisikannya sebagai pengaturan oleh sekelompok kecil. Oligarki didefinisikan sebagai proses dari sebuah tatanan politik sejumlah kecil individu yang memiliki, mempertahankan kekuasaan dan kekayaan oleh pelaku yang memiliki sumber daya material. Mempertahankan kekayaan oleh oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang tidak dimiliki dalam bentuk dominasi atau eksklusif minoritas lain.

Sedangkan, aktor yang menjalankan oligarki adalah oligark (*oligarch*), yaitu pelaku yang menguasai, mengendalikan konsentrasi sumber-sumber kekayaan secara masif, yang akan digunakan untuk mempertahankan kekayaannya atau mengakumulasi. Para oligark mempergunakan kekayaannya untuk mendapatkan posisi sosial yang eksklusif. Peran pemerintah di beberapa negara memang masih terlihat. Akan tetapi, para pemimpin pemerintahan dan segelintir elite yang mendukung mereka (atau takut kepada mereka) tidak begitu peduli pada

pertumbuhan ekonomi. Mereka hanya peduli pada bagaimana mempertahankan bagian keuntungan yang mereka peroleh dari sistem tersebut. Perekonomian ini disebut kapitalis dalam pengertian bahwa hak milik pribadi diijinkan, namun hak tersebut sangat terpusat pada segelintir orang. Perekonomian seperti ini tampaknya lebih tepat dikategorikan sebagai OLIGARKI.

'Para oligark mempergunakan kekayaannya untuk mendapatkan posisi sosial yang eksklusif. Peran pemerintah di beberapa negara memang masih terlihat. Akan tetapi, para pemimpin pemerintahan dan segelintir elite yang mendukung mereka (atau takut kepada mereka) tidak begitu peduli pada pertumbuhan ekonomi. Mereka hanya peduli pada bagaimana mempertahankan bagian keuntungan yang mereka peroleh dari sistem tersebut'

Membaca OLIGARKI adalah menjelaskan motif mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan ini bermacam-macam, tergantung ancaman apa yang dihadapi, termasuk seberapa jauh oligarki terlibat dalam menghadirkan koersi atau pemaksaan yang mendasari segala pengakuan hak milik dan juga apakah upaya itu dilakukan secara sendiri-sendiri atau kolektif. Konsep penting mempertahankan kekayaan (*wealth defense*) juga diperkenalkan di sini. Menurut Winters, ada empat tipologi oligarki yang dominan, yaitu oligarki panglima (*warring*), oligarki penguasa kolektif (*ruling*), oligarki sultanistik (*sultanistic*), dan oligarki sipil (*civil*). Masing-masing tipologi tersebut diberikan penjelasan dengan sajian tambahan pembahasan teori dan contoh kasus. Memang antar masing-masing tipologi oligarki terkesan berdiri sendiri akan tetapi sebetulnya bisa saling komplementer, substitusi, beririsan atau bahkan menegasikan.

Tipologi pertama, oligarki panglima (*warring oligarchy*), dimana pengumpulan kekayaan dengan cepat paling banyak terjadi melalui penaklukan dan mengambil surplus dari produsen primer. Kemampuan oligark digunakan untuk mempertahankan kekayaan dan dengan kekayaan mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Oligark terlibat secara pribadi dalam kekuasaan dan pemaksaan serta beroperasi secara sendiri-sendiri. Sedangkan, oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarchy*) diartikan bahwa para oligark terlibat langsung mempertahankan kekayaan dan memerintah suatu komunitas dengan cara melakukannya secara bersama-sama. Pemerintahan kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang hampir semua isinya adalah oligark. Sementara,

oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*), merupakan proses mempertahankan kekayaan yang dilakukan secara langsung oleh oligark 'bersenjata' yang menguasai daerah masing-masing secara tersendiri dan bukan oleh negara terlembaga yang dibatasi hukum. Ciri utama adanya seorang oligarkis yang sangat dominan mengatur banyak aspek. Di Indonesia bentuk ini pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Tokoh oligark yang dominan diperankan dengan sangat baik oleh Soeharto. Tipologi yang terakhir, yaitu oligarki sipil (*civil oligarchy*) dimana bentuk penguasaan oligark yang menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada pemerintah dimana hukum lebih kuat daripada semua individu. Walaupun oligark tidak melakukan kekerasan dan menanggung beban politis mempertahankan kekayaan sendiri akan tetapi kemunculan aparat negara yang melakukan peran tersebut menghadirkan ancaman baru kepada oligark dalam bentuk pajak dan redistribusi pendapatan. Oligarki sipil muncul untuk mencoba menunjukkan eksistensi dan pencitraan.

Masalah besar bangsa Indonesia adalah tidak meratanya kekayaan di antara warganya. Situasi itu memunculkan apa yang oleh Jeffrey A. Winters disebut oligarki dimana jalannya pemerintahan berada di tangan sekelompok orang yang punya akses besar terhadap sumber-sumber kekayaan. Jeffrey Winters mampu dengan jeli memotret proses transisi reformasi di Indonesia yang telah melahirkan demokrasi. Akan tetapi, sayangnya demokrasi di Indonesia tidak diikuti dengan penegakan hukum. Konsekuensinya, perekonomian dan dunia politik Indonesia dikuasai oleh segelintir Oligark saja. Apabila dibiarkan terus berlangsung, masa depan Indonesia adalah Filipina, bukan China. Ini terlihat dari konstelasi hukum politik yang muncul secara lebih sempit terkait oligark dan elite. Indonesia dianggap Jeffrey memiliki masalah dalam penegakan hukum akan tetapi tampak kontradiksi dari kehidupan sehari-hari sebagian besar warga negara kelihatan teratur. Ini karena kebanyakan orang tunduk pada sistem hukum yang dipelintir dan diintimidasi para oligark. Sebagian besar masalah supremasi hukum berasal dari kekalahan hukum dari orang-orang berkuasa. Kekuasaan hukum tingkat rendah pada tingkat masa relatif lebih mudah dicapai karena warga negara biasa tidak punya sumber daya kekuasaan individual untuk mengubah putusan hukum atau menghalangi peradilan.

Dengan cerdas, Jeffrey juga mampu membaca proses transisi oligarki di Indonesia. Transisi pertama yaitu dari rezim otoriter menuju demokrasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto setelah bertahta lebih dari 30 tahun yang langsung disusul dengan pemilu multipartai yang damai. Kedua, transisi dari *sultanistic oligarchy* menjadi *ruling oligarchy*. Dengan berakhirnya era Soeharto,

berakhir pula *sultanistic oligarchy* di Indonesia. Ironisnya, proses reformasi diboncengi oleh oligark yang berselubung *ruling oligarchy*. Jalannya perekonomian dikuasai oleh segelintir pemilik kekayaan saja. Negara ini ditimpa masalah politik dan ekonomi kronis yang tampaknya makin parah sejak transisi demokratis.

Dalam perjalanannya, *ruling oligarchy* ber-metamorfosis menjadi *civil oligarchy baik yang terlembaga maupun secara samar-samar*. Ini lebih disebabkan karena kebanyakan orang tunduk pada sistem hukum yang dipelintir dan diintimidasi para oligark. Satu-satunya jalan keluar hanya lewat penegakan hukum (*law enforcement*) seperti yang sudah dikupas di depan tadi. Sisi penegakkan hukum di Indonesia sangat lemah, terutama pasca reformasi. Masalahnya bukan pada demokrasi. Demokrasi hanya alat untuk mencapai tujuan bernegara selanjutnya. Masalahnya terletak pada penegakan hukum. Tanpa penegakan dan supremasi hukum, negara hanya akan dibajak oleh kaum oligarkis. Jika supremasi hukum mampu menundukkan oligark dan elite, maka 'kehidupan demokrasi yang sesungguhnya' akan menjadi kenyataan seperti yang dipetakan Jeffrey Winters.

Buku ini telah mengindikasikan adanya ancaman oligarki terhadap kelangsungan demokrasi. Bahwa disparitas atau tingkat kesenjangan kekayaan secara inheren menimbulkan konflik yang mendasari atas kepemilikan kekayaan (terutama ketika sedikit orang memiliki kekayaan yang besar sementara orang lain memiliki jauh lebih sedikit). Dan uniknya, sumber daya kekuasaan terkonsentrasi untuk menghidupi dirinya sendiri. Satu pemahaman yang sangat penting dipahami adalah bahwa oligark dan oligarki berasal dari konsentrasi kekayaan (dan kekuasaan dari kekayaan) yang ekstrem di tangan perseorangan. Artinya, apabila **KESENJANGAN ITU TIDAK ADA, OLIGARK DAN OLIGARKI JUGA TIDAK ADA.** (Awan Hari Murtiadi, *Pemerhati Ekonomi di Lembaga Administrasi Negara*)